

---

## Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia

Tri Sukma Ayu Purba<sup>1✉</sup>, Rati Dormeska Simbolon<sup>2</sup>, Anna Maria Simbolon<sup>3</sup>, Jeremy Suparto Sianipar<sup>4</sup>, Hicca Maria Gandi Putri Aruan<sup>5</sup>

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas HKBP Nommensen, Indonesia

### Abstrak

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) merupakan pedoman penting dalam penyusunan laporan keuangan yang andal, relevan, dan dapat dibandingkan oleh berbagai entitas di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengertian, jenis-jenis, tujuan, fungsi, serta peran kelembagaan dalam pengembangan SAK, sekaligus mengidentifikasi tantangan implementasinya di berbagai sektor. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka, yang melibatkan analisis terhadap dokumen resmi, literatur akademik, serta regulasi terkait. Hasil kajian menunjukkan bahwa SAK di Indonesia diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis, antara lain SAK-ETAP, SAK EMKM, SAK berbasis IFRS, SAK Syariah, dan SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan), yang masing-masing disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan entitas pengguna. Peran Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) sangat krusial dalam pengembangan, sosialisasi, dan harmonisasi SAK dengan standar internasional. Meskipun SAK berkontribusi besar terhadap peningkatan transparansi dan akuntabilitas, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya literasi akuntansi, keterbatasan sumber daya manusia, dan kurangnya infrastruktur pendukung. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, profesi akuntansi, akademisi, dan pelaku usaha untuk meningkatkan pemahaman dan penerapan SAK secara optimal di seluruh sektor ekonomi.

**Kata kunci:** Standar Akuntansi Keuangan, IAI, DSAK, Pelaporan Keuangan, Transparansi, IFRS, UMKM

### Abstract

*Financial Accounting Standards (SAK) are important guidelines in the preparation of reliable, relevant, and comparable financial statements by various entities in Indonesia. This study aims to describe the definition, types, objectives, functions, and institutional roles in the development of FAS, while identifying the challenges of its implementation across various sectors. The approach used is descriptive qualitative with a literature review method, involving analysis of official documents, academic literature, and related regulations. The results of the study show that SAK in Indonesia are classified into several types, including SAK-ETAP, SAK EMKM, IFRS-based SAK, Sharia SAK, and SAP (Government Accounting Standards), each of which is tailored to the characteristics and needs of user entities. The role of the Indonesian Institute of Accountants (IAI) and the Financial Accounting Standards Board (DSAK) is crucial in the development, socialisation, and harmonisation of SAK with international standards. Although SAK contributes significantly to improving transparency and accountability, its implementation still faces various obstacles, such as low accounting literacy, limited human resources, and a lack of supporting infrastructure. Therefore, collaboration between the government, the accounting profession, academia, and business actors is needed to enhance understanding and optimal application of SAK across all economic sectors.*

**Keywords:** Financial Accounting Standards, IAI, DSAK, Financial Reporting, Transparency, IFRS, SMEs

Copyright (c) 2025 Tri Sukma Ayu Purba

---

✉ Corresponding author :

Email Address : [trisukma.purba@student.uhn.ac.id](mailto:trisukma.purba@student.uhn.ac.id)

## PENDAHULUAN

Dalam dunia bisnis dan keuangan modern, penyusunan laporan keuangan yang andal, relevan, dan dapat dibandingkan merupakan elemen krusial dalam menunjang transparansi serta akuntabilitas suatu entitas. Akuntansi memegang peranan penting dalam menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh berbagai pihak berkepentingan—mulai dari manajemen internal, investor, kreditor, hingga regulator pemerintah. Agar informasi keuangan yang disajikan dapat dipercaya dan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum, diperlukan adanya pedoman atau standar akuntansi yang seragam dan terstruktur.

Di Indonesia, kebutuhan akan penyusunan laporan keuangan yang terstandarisasi melahirkan *Standar Akuntansi Keuangan* (SAK) sebagai acuan utama dalam pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan informasi keuangan. SAK disusun dan dikembangkan oleh *Ikatan Akuntan Indonesia* (IAI) melalui *Dewan Standar Akuntansi Keuangan* (DSAK), yang memiliki kewenangan untuk menetapkan praktik akuntansi nasional. Keberadaan SAK menjadi semakin penting seiring meningkatnya kompleksitas transaksi ekonomi dan tuntutan akuntabilitas dari para pemangku kepentingan.

SAK tidak hanya ditujukan untuk entitas besar dan perusahaan publik, tetapi juga mencakup berbagai jenis entitas usaha lainnya seperti usaha kecil dan menengah (UKM), entitas mikro, serta lembaga berbasis syariah. Untuk itu, IAI telah mengembangkan beberapa varian SAK, antara lain: SAK berbasis IFRS untuk perusahaan besar dan terbuka, SAK ETAP (*Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik*) untuk entitas menengah, SAK EMKM untuk usaha mikro dan kecil, serta SAK Syariah untuk entitas yang menjalankan kegiatan berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Masing-masing standar disusun sesuai dengan karakteristik, kompleksitas, dan kebutuhan pengguna laporan keuangan di segmennya masing-masing.

Namun demikian, implementasi SAK di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa di antaranya adalah rendahnya pemahaman pelaku usaha terhadap standar yang berlaku, keterbatasan sumber daya manusia di bidang akuntansi, serta belum meratanya infrastruktur pendukung di seluruh wilayah Indonesia. Tantangan-tantangan ini menunjukkan perlunya peningkatan literasi dan dukungan kebijakan yang memadai untuk mendorong penerapan SAK secara menyeluruh dan efektif.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk membahas secara komprehensif mengenai *Standar Akuntansi Keuangan* (SAK) di Indonesia, dengan fokus pada pengertian dan karakteristiknya, jenis-jenis standar yang berlaku, tujuan dan fungsinya, peran strategis IAI dan DSAK dalam pengembangannya, serta tantangan-tantangan yang dihadapi dalam proses implementasinya. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan kualitas pelaporan keuangan nasional dan mendukung terciptanya sistem ekonomi yang sehat, transparan, dan akuntabel.

## Kajian Pustaka

### Pengertian Standar Akuntansi Keuangan (SAK)

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) merupakan seperangkat prinsip, pedoman, dan aturan yang menjadi dasar dalam penyusunan serta penyajian laporan keuangan oleh berbagai entitas di Indonesia. SAK memiliki fungsi strategis dalam memastikan bahwa

informasi keuangan yang dilaporkan bersifat relevan, andal, dapat dibandingkan, serta mudah dipahami oleh para pengguna laporan keuangan, seperti investor, kreditor, dan regulator (Ikatan Akuntan Indonesia, 2023). Secara konseptual, SAK juga mencerminkan kerangka teoretis yang memuat metode dan prosedur akuntansi yang bertujuan mendukung pengambilan keputusan ekonomi yang tepat oleh pihak-pihak berkepentingan (Sardjan & Basra, 2023).

Tujuan utama diberlakukannya SAK adalah untuk menciptakan keseragaman dan transparansi dalam pelaporan keuangan nasional. Dengan adanya standar ini, seluruh pihak yang menggunakan laporan keuangan dapat melakukan evaluasi ekonomi berdasarkan informasi yang disajikan secara objektif dan terstandarisasi. Oleh karena itu, SAK tidak hanya berfungsi sebagai pedoman teknis, tetapi juga sebagai alat untuk membangun tata kelola keuangan yang baik dan akuntabel.

### Sejarah dan Perkembangan SAK di Indonesia

Seiring dengan dinamika perkembangan ekonomi global dan meningkatnya kebutuhan akan informasi keuangan yang kredibel, SAK di Indonesia telah mengalami transformasi yang signifikan. Pada awalnya, praktik akuntansi di Indonesia mengacu pada Prinsip Akuntansi Indonesia (PAI), yang banyak dipengaruhi oleh sistem akuntansi Amerika Serikat. Namun pada tahun 1994, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) mulai menyusun SAK secara lebih sistematis dan memperkenalkan standar akuntansi nasional (IAI, 1994).

Meskipun demikian, perbedaan signifikan dengan standar internasional membuat laporan keuangan di Indonesia sulit untuk dibandingkan secara global. Menanggapi tantangan globalisasi, pada tahun 2008 IAI menyatakan komitmen untuk melakukan konvergensi penuh terhadap *International Financial Reporting Standards* (IFRS). Proses ini dikenal dengan istilah *IFRS Convergence*, yang dimulai dengan tahapan awal pada tahun 2009 dan pencapaian adopsi IFRS per 1 Januari 2012 (DSAK IAI, 2012). Hingga kini, proses konvergensi terus berlanjut untuk menyesuaikan dengan pembaruan IFRS secara global.

Selain adopsi terhadap IFRS, perkembangan SAK di Indonesia juga mencakup diversifikasi standar sesuai kebutuhan entitas. IAI menerbitkan beberapa jenis SAK yang meliputi: SAK berbasis IFRS untuk entitas publik dan besar, SAK ETAP (*Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik*) untuk entitas menengah, SAK EMKM untuk entitas mikro dan kecil, serta SAK Syariah untuk entitas yang menjalankan aktivitas berbasis prinsip syariah (IAI, 2021). Pendekatan ini dirancang untuk meningkatkan relevansi dan keterterapan standar dalam konteks keberagaman sektor usaha di Indonesia.

### Konsep-Konsep Dasar dalam Standar Akuntansi Keuangan

Penyusunan SAK didasarkan pada sejumlah konsep dasar yang menjadi fondasi dalam proses pencatatan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan informasi keuangan. Beberapa konsep utama yang membentuk struktur teoritis SAK antara lain:

1. Dasar AkruaI (Accrual Basis):

Dalam konsep ini, transaksi diakui pada saat kejadian ekonomi terjadi, bukan saat kas diterima atau dibayarkan. Dasar akruaI memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai posisi dan kinerja keuangan entitas dalam suatu periode pelaporan (PSAK No. 1, 2023).

2. Kelangsungan Usaha (Going Concern):

SAK mengasumsikan bahwa entitas akan terus melanjutkan usahanya di masa depan. Konsep ini penting dalam pengukuran aset dan liabilitas karena menegaskan bahwa tidak ada rencana atau kebutuhan mendesak untuk melikuidasi entitas (IAI, 2023).

3. Konsistensi (Consistency):

Kebijakan dan metode akuntansi yang digunakan harus diterapkan secara konsisten antar periode agar laporan keuangan dapat dibandingkan dari waktu ke waktu. Konsep ini mendukung pengguna laporan dalam melakukan analisis tren dan perubahan posisi keuangan entitas (Siregar & Bachtiar, 2020).

Konsep-konsep dasar tersebut mendukung tujuan SAK dalam menciptakan laporan keuangan yang informatif, komprehensif, dan bermanfaat dalam pengambilan keputusan ekonomi. Pemahaman yang kuat atas konsep ini sangat penting, terutama bagi entitas yang sedang menjalani proses adaptasi terhadap perubahan regulasi dan dinamika pasar keuangan yang semakin kompleks.

## METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan tujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis perkembangan, jenis-jenis, peran kelembagaan, serta tantangan dalam penerapan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan gambaran yang mendalam dan sistematis terhadap fenomena yang dikaji, terutama dalam konteks kebijakan dan praktik pelaporan keuangan di Indonesia (Creswell & Poth, 2018).

Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (library research), dengan menelaah berbagai sumber sekunder seperti buku teks akuntansi, artikel jurnal ilmiah, dokumen resmi dari Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK), publikasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta peraturan terkait dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Selain itu, literatur internasional seperti International Financial Reporting Standards (IFRS) dan artikel dari International Accounting Standards Board (IASB) juga digunakan sebagai pembandingan untuk menilai kesesuaian SAK dengan standar global (Krippendorff, 2018).

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan analisis isi (content analysis), yaitu metode analisis sistematis terhadap isi teks yang bertujuan untuk mengidentifikasi pola, struktur, dan hubungan antar konsep dalam dokumen yang dianalisis (Miles, Huberman, & Saldaña, 2014). Dalam konteks ini, analisis dilakukan terhadap tema-tema utama seperti karakteristik SAK, klasifikasi jenis SAK, peran IAI dan DSAK, serta hambatan dalam penerapan SAK di berbagai jenis entitas.

Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan informasi dari berbagai referensi yang relevan dan kredibel, serta mengutamakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang. Langkah ini dilakukan untuk memastikan validitas isi dan objektivitas hasil temuan (Patton, 2015).

Metode ini dianggap sesuai untuk menjawab tujuan penelitian, yakni memberikan pemahaman mendalam dan menyeluruh mengenai kebijakan dan praktik pelaporan keuangan di Indonesia dalam kerangka Standar Akuntansi Keuangan, serta implikasinya bagi tata kelola dan transparansi entitas publik maupun nonpublik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Karakteristik Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia*

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) merupakan seperangkat prinsip, pedoman, dan aturan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan oleh entitas di Indonesia. Keberadaan SAK sangat penting dalam memastikan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan memenuhi karakteristik kualitatif yang mencakup relevansi, keandalan, keterbandingan, dan keterpahaman. Informasi yang relevan memungkinkan pengguna laporan keuangan mengevaluasi kondisi masa lalu, masa kini, dan masa depan entitas secara lebih akurat. Keandalan merujuk pada penyajian informasi yang bebas dari kesalahan material dan bias, serta mencerminkan realitas ekonomi secara jujur dan netral. Keterbandingan menjadi penting agar pengguna dapat membandingkan laporan antar periode dan antar entitas yang berbeda, yang memerlukan konsistensi dalam penerapan kebijakan akuntansi. Sedangkan keterpahaman menekankan bahwa informasi harus disajikan secara sistematis dan jelas, tanpa menghilangkan substansi penting, sehingga pengguna dengan tingkat pemahaman yang memadai dapat menginterpretasikannya secara tepat (IAI, 2021).

### *Jenis-Jenis SAK yang Berlaku di Indonesia*

Indonesia menerapkan beberapa jenis Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang disesuaikan dengan jenis dan karakteristik entitas. Pertama, SAK-ETAP (Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik) ditujukan bagi entitas seperti UMKM dan koperasi kecil yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan. SAK ini mengedepankan kesederhanaan dalam pengukuran dan pengungkapan, seperti tidak mewajibkan laporan arus kas dan tidak menggunakan nilai wajar secara ekstensif (Iwan Kesuma & Setiawaty, 2016). Kedua, SAK EMKM disusun khusus bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Standar ini hanya mengharuskan penyusunan tiga laporan utama yaitu laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan yang dibuat secara ringkas. Format dan bahasa yang sederhana menjadi keunggulan utama SAK ini, menjadikannya alat edukatif bagi pelaku usaha informal agar mulai membangun sistem keuangan yang akuntabel (SAK EMKM, 2016). Ketiga, SAK berbasis IFRS diperuntukkan bagi perusahaan besar dan perusahaan publik. SAK ini menuntut pengungkapan yang luas, penggunaan nilai wajar, serta estimasi akuntansi yang kompleks. Dengan adopsi IFRS, laporan keuangan menjadi lebih transparan dan dapat diterima di pasar global (IAI, 2023). Keempat, SAK Syariah ditujukan untuk entitas yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah Islam. Standar ini merujuk pada fatwa DSN-MUI dan mengatur pencatatan transaksi berbasis akad syariah seperti mudharabah dan musyarakah, serta melibatkan aspek sosial seperti laporan dana zakat dan wakaf (Ananta & Sisdiyanto, 2024). Terakhir, Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) diterapkan oleh instansi pemerintah untuk menyajikan laporan keuangan publik yang akuntabel. SAP disusun oleh Komite SAP dan menggunakan basis akrual dalam menyusun laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, dan lainnya sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara.

### *Tujuan dan Fungsi SAK*

Tujuan utama dari Standar Akuntansi Keuangan (SAK) adalah untuk menciptakan keseragaman dalam penyusunan laporan keuangan yang transparan dan dapat dipercaya. Dengan adanya standar ini, informasi yang dihasilkan dari laporan keuangan menjadi lebih relevan dan andal untuk digunakan oleh berbagai pihak, termasuk investor, manajemen, regulator, dan masyarakat. Salah satu tujuan penting dari SAK adalah meningkatkan keterbandingan antar entitas dan antar periode, yang memungkinkan analisis tren dan evaluasi kinerja secara lebih objektif. Selain itu, SAK mendorong transparansi dan akuntabilitas melalui penyajian informasi keuangan yang terbuka dan jujur, serta harmonisasi dengan standar internasional seperti IFRS guna mendukung integrasi laporan keuangan Indonesia dalam skala global (Purnama, 2020). Secara fungsional, SAK menjadi acuan utama bagi akuntan dan entitas dalam menyusun laporan keuangan yang sistematis. Ia juga menjamin mutu informasi keuangan, memudahkan proses audit melalui standar pengukuran yang jelas, dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku seperti peraturan OJK dan BEI. Lebih jauh, SAK juga berperan dalam membangun kepercayaan publik terhadap integritas laporan keuangan entitas.

### *Peran IAI dan DSAK dalam Pengembangan SAK*

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) memegang peran strategis sebagai organisasi profesi akuntansi yang bertanggung jawab terhadap pengembangan dan pengawasan implementasi SAK di Indonesia. Peran IAI mencakup penyusunan dan revisi standar, peningkatan kompetensi profesional melalui pelatihan dan pendidikan berkelanjutan, serta penyusunan kebijakan akuntansi nasional yang relevan dengan kebutuhan ekonomi domestik. IAI juga aktif menjalin kerja sama dengan lembaga internasional seperti IASB dan IFAC untuk menjaga agar standar akuntansi Indonesia tetap relevan dan diterima secara global (Yuliani, 2019). Di bawah naungan IAI, Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) memiliki tanggung jawab teknis dalam merumuskan, memperbarui, serta mensosialisasikan SAK. DSAK menyusun standar dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk akademisi dan praktisi, guna menghasilkan pernyataan standar yang aplikatif dan adaptif terhadap perubahan global. DSAK juga melakukan edukasi publik melalui seminar dan publikasi agar SAK dipahami dan diterapkan secara menyeluruh di berbagai lapisan pengguna.

### *Tantangan Implementasi SAK di Indonesia*

Meskipun Standar Akuntansi Keuangan telah disesuaikan dengan karakteristik entitas melalui SAK EMKM, SAK-ETAP, dan IFRS, penerapannya masih menghadapi tantangan yang signifikan. Di sektor UMKM, rendahnya tingkat literasi akuntansi membuat pelaku usaha kesulitan memahami dan mengimplementasikan standar, bahkan masih banyak yang belum melakukan pencatatan keuangan secara sistematis (Manehat & Sanda, 2022). Kurangnya tenaga profesional di bidang akuntansi di daerah-daerah juga menjadi hambatan serius dalam menghasilkan laporan keuangan yang memenuhi standar. Selain itu, keterbatasan infrastruktur teknologi dan tingginya biaya implementasi sistem akuntansi berbasis perangkat lunak juga menjadi kendala, terutama bagi UMKM. Di sisi perusahaan besar, tantangan datang dari perubahan IFRS yang dinamis, yang menuntut SDM akuntansi untuk terus mengikuti pembaruan dan pelatihan secara rutin. Tidak kalah penting, lemahnya pengawasan dan penegakan regulasi turut memperparah rendahnya kepatuhan

entitas terhadap SAK. Banyak entitas yang belum menyusun laporan keuangan standar karena belum ada sanksi atau insentif yang mendorong kepatuhan. Oleh karena itu, peningkatan implementasi SAK membutuhkan kolaborasi lintas sektor, mulai dari peran aktif pemerintah, dunia usaha, hingga lembaga pendidikan dan asosiasi profesi, untuk membangun ekosistem pelaporan keuangan yang lebih andal dan berkelanjutan.

## SIMPULAN

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia merupakan pedoman fundamental dalam penyusunan laporan keuangan yang andal, relevan, dapat dibandingkan, dan mudah dipahami. Keberadaan SAK memperkuat kualitas informasi keuangan yang disajikan oleh entitas, serta mendukung pengambilan keputusan ekonomi yang objektif dan transparan. Penyusunan dan pengembangan SAK dilakukan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) di bawah naungan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), dengan mengadopsi prinsip-prinsip dari International Financial Reporting Standards (IFRS) guna meningkatkan harmonisasi pelaporan keuangan dalam lingkup global.

SAK di Indonesia tidak bersifat seragam tunggal, melainkan terdiri dari beberapa jenis yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing entitas, seperti SAK-ETAP, SAK EMKM, SAK Syariah, SAK berbasis IFRS, serta Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Keragaman ini memungkinkan fleksibilitas dan relevansi penerapan SAK di berbagai sektor, mulai dari usaha mikro hingga perusahaan publik dan instansi pemerintah. Meskipun demikian, implementasi SAK di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya literasi akuntansi, keterbatasan sumber daya manusia profesional, belum meratanya infrastruktur pendukung, serta lemahnya pengawasan dan penegakan regulasi.

Dengan demikian, keberhasilan penerapan SAK tidak hanya bergantung pada ketersediaan standar yang komprehensif, tetapi juga memerlukan sinergi dari seluruh pemangku kepentingan—termasuk pemerintah, profesi akuntan, sektor pendidikan, dan dunia usaha. Peningkatan kapasitas, sosialisasi berkelanjutan, serta adopsi teknologi menjadi langkah strategis untuk mendorong penerapan SAK secara optimal di seluruh entitas. Komitmen yang berkelanjutan terhadap kualitas pelaporan keuangan akan menjadi fondasi penting dalam menciptakan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan berdaya saing di tingkat nasional maupun internasional.

## Referensi :

- Ananta, A. T., & Sisdiyanto, E. (2024). Peran PSAK Syariah dalam meningkatkan kualitas dan akuntabilitas laporan keuangan di perbankan syariah (*The role of Sharia PSAK in improving the quality and accountability of financial reports in Sharia banking*), 7516–7523.
- As'ad, A., Mulang, H., & Basalamah, M. S. A. (2022). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Tingkat Bagi Hasil Akad Mudharabah pada Bank Syariah di Indonesia. *SEIKO: Journal of Management & Business*, 5(2), 408-417.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Iwan Kesuma, A., & Setiawaty, A. (2016). Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) pada penyusunan laporan keuangan. *AKUNTABEL: Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 13(2), 151–163.

<http://journal.feb.unmul.ac.id>

- Krippendorff, K. (2018). *Content analysis: An introduction to its methodology* (4th ed.). SAGE Publications.
- Manehat, B. Y., & Sanda, F. O. (2022). Meninjau penerapan SAK EMKM pada UMKM di Indonesia. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 10(1), 2-11. <https://doi.org/10.21067/jrma.v10i1.6634>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Nurasisah, N., & As' ad, A. (2022). Analisis Proses Manajemen Risiko Perbankan dalam Mengendalikan Risiko Kredit. *Amkop Management Accounting Review (AMAR)*, 2(2), 32-39.
- Patton, M. Q. (2015). *Qualitative research & evaluation methods: Integrating theory and practice* (4th ed.). SAGE Publications.
- Purnama, H. (2020). Pengaruh penerapan sistem informasi akuntansi, standar akuntansi keuangan dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan wajib pajak badan. *Akmenika: Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, 17(2), 403-417. <https://doi.org/10.31316/akmenika.v17i2.1036>
- Ramdani, M. R., Kamidin, M., & Ajmal, A. A. (2018). Implementasi SAK-ETAP pada UMKM warkop di Kota Makassar. *Jurnal RAK (Riset Akuntansi Keuangan)*, 3(2), 109-117.
- SAK EMKM. (2016). Penyusunan dan penyajian laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (studi kasus pada Toko Meubel Zulfa Galery). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 7(2). <http://jimfeb.ub.ac.id>
- Sardjan, B., & Basra. (2023). Penerapan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dalam penyusunan laporan keuangan pada Mandiri Perkasa Utama Makassar. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Ekonomi Bisnis, Manajemen Akuntansi*, 6(2).
- Yuliani, K. S. (2019). Pengaruh orientasi etika, tingkat pengetahuan dan gender terhadap persepsi mahasiswa mengenai perilaku tidak etis akuntan. *Jurnal Sains, Akuntansi dan Manajemen*, 1(1), 180-220.